

PERAN SISTEM PENJAMINAN MUTU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI GRESIK

Ach. Khusnan¹, Muslimatul Alfiyah²
Institut Al Azhar Menganti Gresik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan mutu pendidikan di pendidikan sekolah dasar kab gresik. Melalui pendekatan kolaboratif dan strategis, Dinas Pendidikan memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas SDM dan sarana pendidikan. Kendala yang dihadapi mencakup koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya data mutu yang valid. Solusi yang diupayakan termasuk penguatan kerja sama lintas instansi, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas internal madrasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di tingkat dasar, khususnya di SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya berkelanjutan dan terintegrasi akan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pinjaman Mutu, Dinas Pendidikan, Pendidikan Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di Indonesia, upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda strategis dalam pembangunan nasional, termasuk di tingkat daerah. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar yang merupakan memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, mutu pendidikan di SD perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Di Kabupaten Gresik, keberadaan SD cukup signifikan dan tersebar luas di berbagai kecamatan. Namun demikian, tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan di SD masih cukup kompleks. Permasalahan terkait sarana prasarana, kompetensi guru, serta manajemen sekolah masih menjadi hambatan utama. Maka, dibutuhkan sistem penjaminan mutu yang efektif sebagai solusi peningkatan kualitas pendidikan di SD.

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk menjamin bahwa proses dan hasil pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu tersebut. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis dan supervisional dalam membina satuan pendidikan agar terus mengalami peningkatan mutu. Di Kabupaten Gresik, sistem penjaminan mutu telah mulai

¹Ach. Khusnan, Email: achkhusnan2020@gmail.com

²Muslimatul Alfiyah, Email: muslimatulalfiyah@gmail.com

diterapkan di berbagai satuan pendidikan, termasuk SD, Dinas Pendidikan selalu memberikan kontribusi dalam penguatan mutu pendidikan madrasah. Peran serta aktif dari Dinas Pendidikan dalam pendampingan, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi menjadi kunci penting dalam mendorong perubahan yang positif di lingkungan SD.

Dalam konteks Kabupaten Gresik, sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama setempat menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas program penjaminan mutu. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan sangat diperlukan terutama dalam hal standarisasi mutu, asesmen pendidikan, dan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Keberhasilan program ini tentunya sangat bergantung pada komitmen dan integrasi antara kedua instansi dalam menjalankan tugasnya demi meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Melihat pentingnya peran sistem penjaminan mutu dalam menunjang kualitas pendidikan, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai kontribusi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik terhadap peningkatan mutu pendidikan di Pendidikan Sekolah Dasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program-program penjaminan mutu yang telah dilaksanakan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran tersebut, diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem pendidikan madrasah yang berkualitas, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Akhirnya, peningkatan mutu SD akan turut berkontribusi dalam membentuk masyarakat Gresik yang cerdas, religius, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dikatakan demikian karena Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan mutu pendidikan di pendidikan sekolah dasar kab Gresik. Melalui pendekatan kolaboratif dan strategis, Dinas Pendidikan memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas SDM dan sarana pendidikan. Setelah itu peneliti menganalisis data menurut Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi, teknik analisis data kualitatif yang diterapkan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pendidikan Sekolah Dasar.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik merupakan bagian dari upaya strategis dalam mewujudkan kualitas

pendidikan yang merata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan, termasuk pada Pendidikan sekolah dasar (SD). Dinas Pendidikan selalu memiliki ruang untuk berkontribusi dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, dan kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Secara umum, sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu penetapan standar mutu, pelaksanaan peningkatan mutu, dan evaluasi mutu. Ketiga komponen tersebut menjadi kerangka kerja yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dalam mendampingi satuan pendidikan. Di Kabupaten Gresik, sistem ini dijalankan melalui program-program yang mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), baik dari sisi input, proses, maupun output pembelajaran.

Dalam tahap penetapan standar mutu, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada madrasah-madrasah yang membutuhkan pemahaman tentang delapan standar nasional pendidikan. Dinas memberikan panduan teknis, modul pelatihan, serta menyelenggarakan forum diskusi bersama kepala madrasah dan pengawas. Tujuannya adalah agar seluruh MI memiliki acuan yang sama dalam menetapkan target-target mutu internal mereka. Pada tahap pelaksanaan peningkatan mutu, Dinas Pendidikan menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan guru, workshop pengembangan RPP, supervisi akademik, serta bimtek manajemen berbasis sekolah. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menyasar sekolah-sekolah negeri, namun juga menjangkau SD swasta yang membutuhkan pembinaan. Melalui pendekatan kolaboratif, Dinas Pendidikan juga mendorong adanya praktik berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) antar sekolah/madrasah melalui kelompok kerja guru (KKG) lintas lembaga.³

Kemudian, dalam tahap evaluasi mutu, Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program-program peningkatan mutu yang telah dijalankan. Dinas juga bekerja sama dengan pengawas madrasah dan pihak Kementerian Agama dalam melakukan pemetaan mutu pendidikan menggunakan instrumen seperti PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) dan rapor mutu. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan. Selain ketiga tahap tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik juga berupaya memperkuat sistem informasi mutu pendidikan dengan mengembangkan database capaian sekolah/madrasah secara digital. Hal ini memungkinkan pemantauan mutu dilakukan secara real-time dan berbasis data yang valid, sehingga intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran. Melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sistematis dan terstruktur ini, diharapkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di Gresik dapat terus meningkat. Peran aktif Dinas Pendidikan dalam membina dan mendukung

³ Asiva Noor Rachmayani, 'Peran, Sistem Penjaminan Mjutu Dalam Meningkatkan Mutu Di Madrasah Ibtidaiyah', 2015, p. 6.

madrasah, meskipun berada di luar struktur organisasinya, mencerminkan semangat integratif dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas di daerah.⁴

B. Solusi Bentuk dukungan dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di Pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tidak hanya berfokus pada aspek kebijakan dan regulasi, tetapi juga secara aktif memberikan dukungan nyata dan strategi terencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Bentuk dukungan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendidikan.⁵

1. Dukungan Kelembagaan dan Kebijakan

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program peningkatan mutu di SD. Dukungan ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan bersama, pelaksanaan forum koordinasi, serta integrasi data mutu pendidikan. Dinas juga memberikan dukungan regulatif berupa penyusunan petunjuk teknis dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang bisa digunakan oleh SD sebagai acuan. Yang dikatakan oleh Bapak Sunikan saat pelaksanaan wawancaranya ia mengatakan bahwa “dinas selalu berupaya memberikan dukungan yang terbaik seperti penjelasan di atas dinas pendidikan memfasilitasi pelatihan, forum koordinasi, seminar, dan banyak lain sebagainya”⁶

2. Penguatan Kapasitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Strategi utama yang diterapkan Dinas Pendidikan adalah peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan workshop. Kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan secara berkala dan berbasis pada kebutuhan madrasah, seperti pelatihan dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran diferensiasi, dan asesmen berbasis kompetensi. Dinas juga memfasilitasi guru SD untuk bergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guna mendorong profesionalisme dan kolaborasi antarpengajar.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Dinas Pendidikan turut mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui program bantuan dan advokasi anggaran. Meskipun tanggung jawab utama penyediaan fasilitas MI berada di bawah Kementerian Agama, Dinas tetap memberikan dukungan berupa usulan program kemitraan dengan pemerintah

⁴ Ahmad Sulaiman and others, 'Implementasi SPMI, Penjaminan Mutu, Mutu Pendidikan', 4.1 (2016), pp. 17–32.

⁵ Opan Arifudin, 'Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi', *Jurnal Ilmiah MEA*, 3.1 (2019), pp. 161–69, doi:10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169.

⁶ Bapak Sunikan, Kepala bidang Kelembagaan SD Dinas pendidikan Kab Gresik

provinsi dan pusat, serta penguatan peran komite sekolah dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk peningkatan sarana pendidikan.

4. Strategi Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Berkelanjutan

Sebagai bagian dari strategi pengendalian mutu, Dinas Pendidikan menjalankan sistem monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap program-program yang diterapkan di SD. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, mencakup evaluasi proses pembelajaran, kualitas manajemen sekolah, serta hasil belajar siswa. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut yang melibatkan pengawas madrasah dan pendamping teknis, sehingga proses peningkatan mutu dapat berlangsung secara berkesinambungan.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik juga mulai mengintegrasikan teknologi dalam sistem penjaminan mutu, seperti penggunaan aplikasi pelaporan mutu sekolah, sistem pelatihan daring (*e-learning*), dan database capaian pembelajaran. Pendekatan ini membantu SD dalam melakukan refleksi dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, teknologi juga dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pelatihan guru dan mempercepat proses pembinaan.

Melalui berbagai bentuk dukungan dan strategi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan, termasuk Pendidikan Sekolah Dasar yang menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan dasar. Pendekatan yang dilakukan bersifat kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing madrasah. Strategi yang diterapkan juga berorientasi pada hasil dan perbaikan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong transformasi pendidikan yang lebih berkualitas, adil, dan merata.⁷

C. Kendala Dalam Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Di Pendidikan Sekolah Dasar, Serta Bagaimana Solusi Yang Diupayakan

Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Pendidikan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kendala-kendala ini berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan program peningkatan mutu. Kendala tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga struktural, koordinatif, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut serta merumuskan solusi konkret sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.⁸

⁷ Bella Ghia Dimmera and Pebria Dheni Purnasari, 'Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Mutu', *Sebatik*, 25.2 (2021), pp. 367–72, doi:10.46984/sebatik.v25i2.1615.

⁸ I Made Pater, I Made Yudana, and Nyoman Natajaya, 'Studi Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendala Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Mutu', *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran*, 3.1 (2020), p. 95, doi:10.23887/jp2.v3i1.24364.

1. Koordinasi Lintas Lembaga yang Belum Optimal

Salah satu kendala utama adalah terbatasnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama selaku instansi pembina langsung Madrasah Ibtidaiyah. Perbedaan kewenangan administratif kerap menjadi kendala dalam implementasi program bersama. Hal ini menyebabkan beberapa program peningkatan mutu tidak dapat dijalankan secara maksimal. Solusi: Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun forum komunikasi reguler antara Dinas Pendidikan dan Kemenag melalui MoU atau nota kesepahaman, sehingga terjadi sinergi kebijakan dan saling melengkapi peran dalam pembinaan SD.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Masih banyak guru dan tenaga kependidikan di SD yang belum sepenuhnya memahami konsep dan teknis pelaksanaan penjaminan mutu. Selain itu, tidak semua madrasah memiliki tenaga khusus yang menangani manajemen mutu. Solusi: Dinas Pendidikan dapat mengadakan pelatihan intensif dan pendampingan teknis, serta merekomendasikan penguatan struktur tim penjaminan mutu internal di madrasah. Keterlibatan pengawas dan narasumber dari praktisi pendidikan juga dapat mempercepat proses peningkatan kapasitas.

3. Rendahnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Mutu

Banyak madrasah belum memiliki sistem pendokumentasian dan pelaporan mutu yang memadai. Akibatnya, proses evaluasi menjadi tidak akurat dan perencanaan program sulit dilakukan berbasis data. Solusi: Dinas Pendidikan dapat menyediakan aplikasi sistem informasi mutu berbasis digital yang terintegrasi, sekaligus memberikan pelatihan bagi operator sekolah agar data yang diinput valid dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan.

4. Terbatasnya Anggaran dan Sarana Pendukung

Keterbatasan dana sering kali menghambat pelaksanaan program-program peningkatan mutu, baik dari sisi pelatihan guru, penyediaan bahan ajar, maupun perbaikan sarana prasarana. Solusi: Dinas Pendidikan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga donor, CSR perusahaan lokal, maupun memfasilitasi madrasah untuk mengakses dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pendampingan teknis.

5. Tingkat Partisipasi Madrasah yang Variatif

Tidak semua madrasah memiliki komitmen yang sama dalam mengikuti program peningkatan mutu. Ada yang aktif dan responsif, namun ada pula yang pasif atau kurang terbuka terhadap pembinaan. Solusi: Dinas dapat membuat sistem insentif berbasis kinerja mutu dan penghargaan bagi madrasah yang aktif serta menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini dapat memotivasi madrasah lain untuk lebih terlibat dalam proses peningkatan mutu.

Melalui identifikasi kendala dan penentuan solusi yang tepat, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat terus memperbaiki pendekatan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan perubahan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan terukur. Dengan strategi yang disusun secara sistematis dan

melibatkan semua pihak, baik dari internal madrasah maupun eksternal seperti Kemenag dan masyarakat, diupayakan agar seluruh Madrasah Ibtidaiyah di Gresik mampu berkembang merata, dan mencapai standar mutu pendidikan yang diharapkan secara berkesinambungan.⁹

KESIMPULAN

Sistem penjaminan mutu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik telah menunjukkan peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Melalui berbagai strategi seperti pelatihan guru, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi, Dinas berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Meskipun terdapat kendala seperti koordinasi lintas lembaga yang belum maksimal, keterbatasan SDM, dan minimnya data mutu, solusi telah diupayakan secara bertahap. Pendekatan kolaboratif antar instansi menjadi kunci dalam menyinergikan peran Dinas dan Kementerian Agama. Selain itu, pemantauan berkelanjutan dan evaluasi berbasis data menjadi langkah penting dalam menjaga mutu pendidikan. Perlu adanya komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menjawab tantangan yang ada. Dengan strategi yang tepat dan pelibatan aktif semua pemangku kepentingan, mutu SD di Gresik dapat terus meningkat. Harapannya, pendidikan dasar yang unggul akan membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, Opan, 'Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi', *Jurnal Ilmiah MEA*, 3.1 (2019), pp. 161–69, doi:10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169.
- Asiva Noor Rachmayani, 'Peran, Sistem Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Mutu Di Madrasah Ibtidaiyah', 2015, p. 6
- Dimmera, Bella Ghia, and Pebria Dheni Purnasari, 'Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Mutu', *Sebatik*, 25.2 (2021), pp. 367–72, doi:10.46984/sebatik.v25i2.1615
- Pater, I Made, I Made Yudana, and Nyoman Natajaya, 'Studi Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendala Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Mutu', *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran*, 3.1 (2020), p. 95, doi:10.23887/jp2.v3i1.24364
- R. Supyan Sauri, 'Strategi Peningkatan Pendidikan Implementasi Penjaminan Internal (Spmi) Di Universitas Islam Bandung', *Media Nusantara*, 16.1 (2022), pp. 27–40
- Sulaiman, Ahmad, Udik Budi Wibowo, Universitas Gadjah Mada, and Universitas Negeri Yogyakarta, 'Implementasi SPMI, Penjaminan Mutu, Mutu Pendidikan', 4.1 (2016), pp. 17–32

⁹ R. Supyan Sauri, 'Strategi Peningkatan Pendidikan Implementasi Penjaminan Internal (Spmi) Di Universitas Islam Bandung', *Media Nusantara*, 16.1 (2022), pp. 27–40.